

*Seminar Nasional*

**PENINGKATAN DAYA SAING AGRIBISNIS BERORIENTASI  
KESEJAHTERAAN PETANI**

Bogor, 14 Oktober 2009

***Kemitraan Pemasaran Komoditas Sapi Potong  
dalam Mendukung Usaha Peternakan Rakyat di  
Propinsi Gorontalo***

oleh

**Iwan Setiaje Anugrah dan Wahyuning K. Sedjati**



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2009**

# KEMITRAAN PEMASARAN KOMODITAS SAPI POTONG DALAM MENDUKUNG USAHA PETERNAKAN RAKYAT DI PROPINSI GORONTALO

Iwan Setiajie Anugrah dan Wahyuning K. Sejati

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A Yani No 70 Bogor 16161*

## ABSTRAK

Usaha ternak sapi potong merupakan salahsatu sumber pendapatan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Pada saat ini usaha ternak sapi potong mendapat perhatian yang cukup besar dari semua pihak terkait. Hal ini mengingat sapi potong ditargetkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Gorontalo setelah jagung. Modal dasar pencapaian target tersebut didukung oleh potensi ternak, kemampuan masyarakat secara teknis maupun manajemen pemeliharaan ternak yang selama ini terkait dengan program PUTKATI dan program lain yang tersebar dalam kaitan pengembangan usaha peternakan rakyat di Provinsi Gorontalo. Perhatian dan komitmen dari berbagai pihak terkait yang diberikan sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing telah berdampak positif bagi upaya menjadikan ternak sapi potong sebagai komoditas ekonomi kedua setelah jagung. Wujud konkret untuk menjadikan sapi potong sebagai basis perekonomian masyarakat diantaranya adalah dengan kemitraan (*partnership*) pemasaran komoditas sapi potong yang melibatkan seluruh *stakeholder* (para pelaku) terkait. Kemitraan tersebut secara intensif dipantau oleh seluruh jajaran pemerintahan baik di tingkat provinsi hingga pemerintahan desa dalam bentuk penyediaan perangkat kebijakan yang mengatur bagaimana proses kemitraan tersebut dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga kegiatan tersebut memberikan dampak bagi peningkatan usaha ternak rakyat dan perekonomian daerah secara lebih luas. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kemitraan pemasaran ; kinerja kemitraan yang terlibat ; peran pemerintah daerah dalam kemitraan maupun peran serta lembaga keuangan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan metode survai melalui wawancara kepada para pelaku kemitraan di tingkat propinsi hingga wilayah kabupaten dan desa

**Kata kunci :** *sapi potong, kemitraan pemasaran, peran pemerintah daerah*

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo telah dicanangkan menjadi komoditas unggulan kedua dari sektor pertanian, menyusul kesuksesan komoditas jagung yang selama ini telah menjadi basis perekonomian daerah sekaligus sumber perekonomian masyarakat di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Kesuksesan pola usahatani yang diterapkan dalam pengembangan jagung telah menjadi dasar untuk pencapaian target keberhasilan sapi potong sebagai sumber perekonomian masyarakat di provinsi tersebut, dimana salah satunya melalui kegiatan kemitraan diantara para pelaku yang terkait dengan usaha peternakan sapi potong.

Kegiatan kemitraan usaha peternakan sapi potong di Provinsi Gorontalo, pada dasarnya sudah dilakukan sejak adanya program Putkati (Program Usaha Ternak Kawasan Timur Indonesia), yaitu pada saat Provinsi Gorontalo masih menjadi bagian

pemerintahan kabupaten dari Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut terus berjalan sampai saat ini, sekaligus menjadi cikal bakal model kerjasama usaha ternak sapi potong yang dilakukan dalam kelompok petani-peternak.

Kerjasama pemasaran usaha ternak yang dilakukan, terbatas pada pemasaran oleh pedagang ternak antar pulau, sekalipun pernah juga dilakukan pemasaran melalui ekspor perdana sapi potong hidup untuk pemenuhan permintaan daging ke Negara Malaysia. Namun pemasaran ternak hidup tersebut kemudian menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaan ekspor berikutnya.

Kemitraan pemasaran sapi potong dilakukan dengan jalan ekspor sapi melalui kegiatan BUMD, yang kemudian berkembang pada kegiatan pasokan sapi yang dilakukan oleh belantik dan pedagang lokal maupun para pedagang antar pulau terhadap pasar sapi lokal. Kegiatan tersebut berdampak pada gairah peternak untuk memelihara sapi potong dengan sistem penggemukan, melalui kelompok petani-peternak dalam program Putkati, atau melalui program-program kerjasama yang terus berkembang melalui lembaga-lembaga permodalan yang ada, serta BUMD Kabupaten yang memfasilitasi pemberian bantuan ternak kepada para petani-peternak dengan pola bergulir. Bentuk kerjasama ini merupakan salah satu persyaratan dalam pola kemitraan yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan peternak dalam tingkatan kelompok petani-peternak yang ada di wilayahnya.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 dengan menggunakan metode survei. Kemitraan yang dikaji dalam kegiatan ini dibatasi pada kemitraan pemasaran yang bersifat formal maupun kemitraan yang bersifat informal. Responden penelitian meliputi kelompok petani-peternak, pedagang ternak lokal dan antar wilayah, Badan Usaha Milik Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, Dinas Peternakan Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, Bank Rakyat Indonesia Provinsi Gorontalo, Bank Pembangunan Daerah (BPD-Sulut), PT. Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) serta Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.

Materi yang disampaikan dalam makalah ini merupakan bagian dari laporan hasil penelitian DIPA TA 2008 tentang Pengembangan Kelembagaan Partnership dalam Pemasaran Komoditas Pertanian serta beberapa informasi terkait dari berbagai sumber.

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN POPULASI DAN RUMAHTANGGA PETERNAK**

Provinsi Gorontalo terbentuk pada tanggal 16 Februari 2001. Sampai dengan tahun 2006, peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dan PDRB adalah paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2006, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sekitar 50 persen. Sementara itu, pada periode 2000-2006 peranan sektor pertanian masih relatif tinggi, yaitu sekitar 30 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Komoditas yang berperan besar dalam PDRB sektor pertanian diantaranya adalah jagung dan sapi potong. Pada periode 2001-2007, pertumbuhan populasi berkisar antara 1.46-15.60 persen/tahun. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2004 (15.60 %/tahun) dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung menurun (Gorontalo Dalam Angka 2007). Lokasi penyebaran sapi potong di Provinsi Gorontalo, didapatkan bahwa kabupaten Gorontalo memiliki populasi terbesar yaitu 114.537 ekor, disusul kabupaten Pohuwato (41.312 ekor)

Pada tahun 2007, jumlah rumah tangga 34,577. Pengembangan usaha ternak di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui kelompok peternak. Pada tahun 2007, jumlah kelompok peternak sapi mencapai 774 buah, sebagian besar (sekitar 40%) terdapat di Kabupaten Gorontalo. Usaha ternak di wilayah ini sudah menjadi cabang usaha di samping usaha tani yang dilakukan, dengan rata-rata pemilikan 2-3 ekor/Ruta. Berkembangnya usaha ternak didukung oleh ketersediaan hijauan makanan ternak yang masih melimpah.

Munculnya komoditas ternak sapi potong sebagai unggulan kedua di Provinsi Gorontalo didasarkan pada potensi sumberdaya ternak, ketersediaan ladang penggembalaan, dan potensi sumberdaya peternak. Teknik pemeliharaan ternak masih mengandalkan sistem penggembalaan dan relatif sedikit yang menggunakan sistem perkandangan. Selain potensi yang ada, perkembangan populasi sapi di Gorontalo atas inisiatif Pemerintah Daerah yang mendorong pengembangan sapi potong, baik dari dana APBN maupun APBD. Program-program tersebut antara lain adalah Putkati (Program Usahatani Kawasan Timur Indonesia), BPLM (Bantuan Penguatan Langsung Masyarakat), PUMK (Penguatan Usaha Modal Kelompok).

Putkati merupakan kesinambungan program yang dirintis sejak tahun 96/97 pada saat Gorontalo masih merupakan kabupaten dari Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kegiatan Putkati adalah memberikan bantuan sapi di wilayah Provinsi Gorontalo yang meliputi Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Pada tahun 1996/1997 jumlah ternak sapi Putkati adalah 8095 ekor dan mencapai 11833 ekor pada tahun 2006. Perkembangan populasi ternak sapi potong juga telah menumbuhkan sistem perguliran ternak kepada kelompok tani lainnya yang memenuhi syarat untuk menerima perguliran ternak sapi tersebut. Pola perguliran dan pengembalian

ternak sapi berdasarkan konsep program dan aturan yang telah ditetapkan dalam MoU Putkati diantaranya terdapat berbagai persyaratan yang intinya diharapkan para petani dan peternak dapat memenuhi perjanjian yang sudah ditetapkan antar Pemerintah daerah dan kelompok tani penerima bantuan. Oleh karena itu sangat dipersyaratkan bahwa kelompok tani tersebut berpengalaman dalam melakukan pemeliharaan ternak khususnya sapi, sebagai syarat yang utama.

## BENTUK KELEMBAGAAN PEMASARAN SAPI POTONG

### Bentuk Kelembagaan Pemasaran Non Mitra

Bentuk kelembagaan pemasaran sapi di Gorontalo dilakukan melalui pola pemasaran umum (Non-mitra) maupun pola kemitraan. Pada pola umum (Non Mitra). Kelembagaan pemasaran Non Mitra untuk komoditas sapi potong di lokasi penelitian disajikan pada diagram 1. Dari diagram tersebut nampak bahwa secara umum sistem pemasaran ternak sapi potong ataupun bibit sapi bakalan, dilakukan dengan pembelian dari petani oleh blantik, kemudian blantik menjual sapi tersebut ke pedagang besar antar pulau atau ke pasar hewan. Untuk memenuhi jumlah sapi yang akan diperdagangkan antar pulau, pedagang antar pulau juga melakukan pembelian dari para peternak yang menjual langsung, dari blantik lokal maupun dari pasar hewan lokal yang ada disekitar tempat tinggal pedagang besar tersebut. Setelah sapi dibeli, sapi tersebut digemukkan hingga cukup besar untuk dijual. Penentuan harga didasarkan pada kondisi fisik ternak, perkiraan jumlah daging dan biaya angkut serta ongkos perdagangan ternak antar pulau yang diperhitungkan dalam satu kesepakatan harga antara pembeli dan penjual.

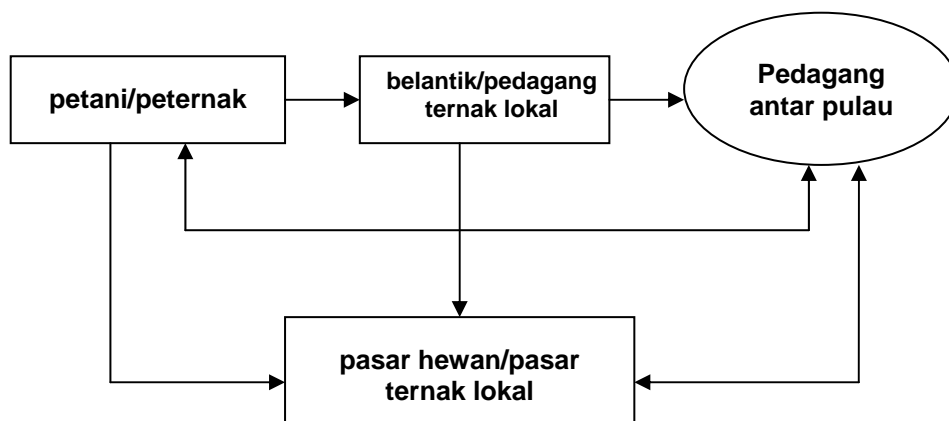


Diagram 1. Pemasaran Ternak Sapi Potong di Tingkat Pedagang dan Petani-Peternak

Penjualan ternak sapi selain diperuntukan bagi pemenuhan konsumsi daging dan protein hewani masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sampai saat ini kegiatan penjualan ternak sapi potong antar pulau sebagian besar masih ditujukan untuk pemenuhan pasar di Kalimantan Timur, Palu dan Sulawesi Utara, sekalipun masih ada permintaan kebutuhan

ternak sapi untuk Kawasan Timur lainnya, seperti wilayah Papua yang sampai saat ini belum bisa dipenuhi.

### **Bentuk Kelembagaan Pemasaran yang ber- Mitra**

Selain perdagangan antar pulau kegiatan pemasaran ternak sapi potong juga direncanakan melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor tersebut dirintis melalui BUMD ke Malaysia yang dilakukan oleh PT Gorontalo Fitrah Mandiri (Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo) dengan Duta Sierra Development Sdn. Bhd, di Kuala Lumpur.

Pemasaran sapi potong asal Gorontalo, yang dilakukan melalui kontrak dengan negara Malaysia melalui ekspor, masih dihadapkan pada kesepakatan sistem kendali ekspor, khususnya yang menyangkut ekspor ternak sapi hidup jenis sapi Bali yang banyak diusahakan oleh para petani-peternak di Gorontalo. Pengalaman ekspor ternak sapi Bali hidup yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Barat beberapa tahun lalu, mendorong kewaspadaan semua pihak terkait untuk lebih berhati-hati, terutama dalam hal perijinan ekspor yang harus juga disepakati antara pemerintah pusat dan daerah, maupun dari lembaga-lembaga terkait yang ada.

Ketentuan perijinan ekspor baik dari sisi teknis maupun substansi harus ditaati bersama sebagai suatu aturan main yang berlaku secara nasional, sekalipun tidak semua kepentingan daerah dapat difasilitasi. Dua kepentingan tadi hendaknya menjadi satu kesatuan dalam konteks nasional, dalam artian berbagai segi juga harus menjadi pertimbangan dalam satu kebijakan maupun dampak, dengan tidak mengesampingkan peluang yang ditawarkan oleh negara pengimpor/*buyer* dari produk yang kita miliki, sehingga semua pihak tidak dirugikan.

Namun demikian, Gorontalo melalui BUMD tetap dapat memanfaatkan peluang ekspor ternak sapi potong hidup maupun daging segar dengan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pengiriman daging segar dapat memanfaatkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada, sehingga mempunyai dampak pada pengembangan nilai tambah serta lapangan pekerjaan sektor riil lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bentuk kerjasama lain juga dilakukan oleh BUMD dengan peternak adalah usaha penggemukan sapi potong. Kerjasama dilakukan melalui sistem bagi hasil dengan perbandingan keuntungan sebanyak 70:30, serta periode kerjasama selama 4 bulan. Terdapat 5 kelompok tani yang telah mendapatkan kredit program dimana setiap kelompok mendapatkan 10 ekor ternak sapi. Dalam pola kerjasama terdapat beberapa sistem pengadaan sapi bakalan. Pola pertama, yaitu pada tahun 2006, sistem pembelian/pengadaan sapi bakalan dilakukan pihak BUMD bersama dengan kelompok.

Sementara pada Pola kedua, yaitu pada tahun 2007, sistem pengadaan sapi dilakukan dengan melalui tender. Berdasarkan masukan yang didapat, melalui sistem

tender banyak ternak yang kurang baik. Pola ketiga yaitu tahun 2008, dimana pada sistem ini telah dikelola dana sebanyak 250 juta untuk 5 kelompok tani. Pada sistem ini kelompok melakukan pengadaan sapi dengan membeli sendiri. Sistem kandang yang digunakan adalah kandang kelompok. Penggunaan sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: (1) Memudahkan kontrol ; (2) Dinamika kelompok lebih baik karena secara otomatis anggota kelompok sering bertemu dikandang; (3) Sapi dapat dideteksi berahi; (4) Kotoran sapi dapat dimanfaatkan.

## **KINERJA PELAKU KEMITRAAN**

Pola kemitraan pemasaran yang dilakukan sub sektor peternakan, pada kenyataannya tidak secara langsung melibatkan peran *supplier*. Hal ini karena untuk persediaan bibit yang berkembang saat ini, dilakukan oleh para petani-peternak secara langsung, baik melalui perguliran sapi yang diusahakan maupun dari hasil pembelian secara perorangan dari pasar-pasar hewan yang ada disekitar petani-peternak. Peran *supplier* bibit ternak terjadi pada saat program Putkati pertama kali dilaksanakan, dimana untuk pengadaan bibit sapi jenis sapi bali, sepenuhnya dilakukan oleh mitra kerja proyek tersebut dengan pengawasan dari Dinas Peternakan setempat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Perkembangan selanjutnya manajemen perusahaan peternakan dilakukan oleh kelompok petani-peternak dalam kaitan keberlangsungan usaha ternak di masing-masing kelompok. Namun demikian bagi lokasi baru di luar program Putkati pola pengadaan bibit sapi yang disalurkan kepada para petani-peternak, pada awalnya dilakukan oleh BUMD setempat dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten dengan klasifikasi bibit yang terseleksi harus sesuai dengan rekomendasi yang telah menjadi ketentuan pengadaan bibit sapi yang akan dikerjasamakan. Berikut disampaikan kinerja pelaku kemitraan yang terlibat dalam pola kerjasama .

### **Kinerja Kelompok Tani di Desa Tanjung Harapan**

Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo merupakan salah satu desa yang pernah mendapatkan program Putkati. Kelompok tani penerima program Putkati tahun 2002 adalah kelompok tani “Mootileno”, kelompok tani “Rejeki” , dan kelompok tani “Maju”. Jumlah sapi yang diberikan kepada setiap peternak yaitu 2 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Dalam perjanjian pengembalian ternak dilakukan paling lambat 5-7 tahun. Dari setiap ekor ternak betina yang didapatkan dalam waktu yang telah ditentukan harus mengembalikan 2 anak umur 1,5 tahun, Sementara untuk ternak jantan, satu ekor ternak mengembalikan satu anak umur 1,5 tahun. Jenis sapi yang diberikan dalam program Putkati ini adalah sapi Bali.

Dilihat dari karakteristik dari peternak penerima program Putkati rata-rata peternak sudah berpengalaman beternak selama 8 tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan peternak cukup bijaksana, karena penerima program Putkati bukan orang yang belum pernah beternak. Selain beternak, responden juga berusaha tanam, yaitu tanaman pangan jagung. Luas lahan rata-rata yang dimiliki peternak adalah 3 hektar. Dalam mengelola usahatani, untuk sehari-harinya peternak mengandalkan dari usahatani jagung. Sementara sapi digunakan sebagai tabungan untuk anak sekolah, hajatan. Meskipun demikian, peranan sapi bukan hanya sebagai usaha sampingan tetapi sebagai cabang usaha. Jumlah sapi yang dimiliki rata-rata 3 ekor.

Pemeliharaan sapi oleh peternak masih digembalakan. Tenaga kerja yang digunakan untuk pemeliharaan sapi dapat dirinci sebagai berikut: Pada jam 7 sapi dilepas dari ikatan didekat rumah untuk dibawa ke lapang. Dilapang sapi dibiarkan untuk merumput. Pada jam 10 pagi yaitu disaat matahari sudah mulai panas, sapi diikat kembali ditempat teduh. Ditempat ini sapi cukup diberi minuman. Pada jam 15.00, sapi dilepas kembali untuk mencari makan. Tetapi tidak semua peternak melakukan hal demikian. Apabila peternak malas melepas sapi kembali maka sapi tetap diikat dan diberi rumput seadanya. Pada pukul 17.00 sore untuk sapi yang digembalakan, dibawa pulang dan diikat kembali dirudekat rumah. Sebagai tambahan pakan, beberapa peternak memberikan dedak untuk makanan penguat. Rata-rata jumlah dedak yang digunakan untuk setiap ekor ternak per bulan adalah sekitar satu karung (60kg), dimana harga per karung adalah Rp 35.000. Selain dedak, sesekali peternak juga memberi pakan berupa batang pisang yang dicacah, batang jagung serta rumput gajah. Rata-rata peternak juga memiliki lahan untuk ditanami rumput sebanyak 0,5 hektar.

Pada musim tertentu, sapi juga berfungsi sebagai tenaga kerja. Pada umumnya saat yang digunakan untuk menggarap sawah yaitu pada pukul 7 sampai 11 siang. Upah sewa ternak untuk menggarap selama setengah hari termasuk orang yang mengerjakannya adalah sebanyak Rp. 25.000/2 ekor ditambah makan sekitar Rp 5.000. Dalam satu tahun terdapat 2 kali musim tanam. Rata-rata penghasilan peternak dari menyewakan ternak dalam satu tahun (2 musim tanam) adalah Rp. 750.000.

Beberapa hal positif yang perlu dicatat yaitu bahwa Program PUTKATI di wilayah ini cukup berhasil. Sebagai contoh kasus dari beberapa peternak yang diwawancarai didapatkan masukan bahwa sejak diberi kredit program pada tahun 220 sebanyak 2 ekor, sampai saat ini telah berkembang menjadi 12-14 ekor dengan sistem penggemukan. Disamping itu peternak juga telah banyak yang menggulirkan ternaknya.

### **Kinerja Kelompok Tani Balijaya, Desa Sidomukti**

Kelompok Tani Balijaya merupakan salah satu kelompok tani di desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Kelompok ini merupakan eks penerima Program Putkati. Melalui program ini, dalam suatu contoh kasus, satu kelompok tani

yang terdiri dari 25 orang peternak mendapatkan sapi sebanyak 55 ekor dimana rata-rata setiap peternak mendapatkan 2 ekor sapi betina, dan beberapa peternak lain ada yang mendapatkan sapi pejantan. Program Putkati ini dinilai cukup berhasil karena dari 3 kelompok tani penerima bantuan program bergulir, pada saat ini telah berkembang menjadi 21 kelompok tani.

Pada saat ini peternak juga telah banyak yang akses ke Bank untuk meminjam kredit modal kerja. Akses peternak ke BRI diperoleh melalui sosialisasi dari Dinas Peternakan dan dari bank tersebut. Di wilayah ini, dengan melalui rekomendasi dari Dinas Peternakan, terdapat tujuh orang peternak ex penerima Program Putkati yang telah berhasil mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BRI untuk usaha penggemukan sapi potong. Dari ke tujuh orang tersebut, empat orang peternak mendapatkan pinjaman masing-masing sebesar Rp.25.000.000; 2 orang mendapatkan masing-masing Rp.20.000.000 dan 1 orang mendapatkan pinjaman Rp.15.000.000,-. Dari pengalaman peternak yang mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.25.000.000 bisa digunakan untuk membeli 5 ekor sapi seharga Rp. 3-5 juta per ekor.

Perjanjian pembayaran dengan Bank dilakukan setiap 4 bulan selama 3 tahun. Pada tahun pertama dan kedua setiap bulannya membayar Rp.4.000.000 dan tahun ketiga membayar dua kali setoran sebanyak Rp.3.500.000 dan Rp.4.500.000 sehingga total jumlah setoran sebanyak Rp.29.500.000. Dalam internal kelompok sendiri dilakukan kesepakatan yaitu jika terdapat 1 orang peternak yang tidak dapat membayar maka akan dibantu anggota lainnya. Untuk keberlanjutan usaha ini dilakukan dengan jalan arisan uang yang sekaligus untuk mengecek keberadaan sapi.

Syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank yaitu: menyerahkan surat pernyataan hak atas tanah menjadi agunan; tidak tercatat sebagai debitur bermasalah dari BRI/bank lain dan tidak sedang menikmati pinjaman kemitraan lainnya; agunan (surat HM) disimpan di bank. Persyaratan lainnya yaitu pinjaman hanya boleh digunakan untuk menunjang usaha dan tidak diperkenankan untuk kegiatan konsumtif. Pencairan dana dilampiri rencana penggunaan dan rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi. Salah satu contoh dari peternak yang mendapatkan kredit dari BRI mencapai jumlah Rp.20.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 6 persen per tahun flat. Provisi sebanyak 1 persen per tahun yaitu sebesar Rp. 200.000/thn. Jadwal pembayaran dilakukan 4 bulan sekali dimana pada tahun pertama sebesar Rp.2.000.000 ditambah bunga Rp.400.000.

### **Kinerja BUMD : PT Gorontalo Fitrah Mandiri**

Berkaitan dengan kinerja yang dilakukan oleh BUMD, melalui PT. Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) sebagai salah satu lembaga/badan usaha milik Pemda Provinsi Gorontalo yang didirikan pada tahun 2002, telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sistem agribisnis secara keseluruhan menjadi *core bisnis* GFM sehingga

kedudukan BUMD tersebut, selain mengatur pelaksanaan kegiatan investasi juga bergerak dalam bidang pemasaran hasil-hasil komoditas pertanian unggulan yang merupakan *icon* dari Pemda Gorontalo, baik melalui kerjasama kontrak pemasaran ekspor maupun dalam kaitan perdagangan di dalam negeri. Dengan mekanisme *market driven* dan *market oriented* untuk tujuan pencapaian profit dan penstabil harga komoditas pertanian di pasaran, sehingga diharapkan berdampak positif bagi nilai tukar produk yang dihasilkan oleh para petani-peternak, serta memberikan *multiflier effect* terhadap pembangunan infrastruktur dan akses pertanian secara luas, khususnya yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. Gorontalo Fitrah Mandiri (FGM) sebagai salah satu BUMD milik Pemda Provinsi Gorontalo, dengan perkembangan jumlah asset permodalan (tahun 2003-2005) sebesar Rp 11,220 milyar dan 99,998 persen diantaranya merupakan saham Pemprov Gorontalo dan kemudian struktur permodalan PT FGM juga bertambah sebesar Rp 18,3 milyar, melalui tambahan modal Pemprop serta pinjaman perbankan pada tahun 2006. Asset permodalan PT. GFM tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha di berbagai bidang kegiatan yang dijalankan..

### **Kinerja Lembaga Pembiayaan Daerah**

Dalam hal pendanaan dan permodalan, peran lembaga pembiayaan yang tergabung dalam perbankan daerah telah banyak berperan dalam proses perwujudan program yang dicanangkan, melalui pemberian dana pinjaman kredit bagi para petani dan peternak. Informasi dari pihak perbankan yang ikut serta dalam pembiayaan sektor pertanian dan peternakan di wilayah Gorontalo, sampai saat ini telah dilakukan berbagai kemudahan melalui program-program kredit yang disediakan pihak perbankan untuk mendorong pada penguatan modal para petani-peternak. Kredit yang dilakukan untuk mengembangkan usaha secara langsung dapat diakses secara mudah dengan sistem kolektif maupun perorangan, sesuai dengan jumlah plafon dan program kredit yang sudah disediakan oleh pihak bank.

Bank Rakyat Indonesia, misalnya dalam kaitan mendukung program pengembangan usaha peternakan, telah mengeluarkan produk-produk pinjaman melalui Skim kredit yang dapat diakses oleh para petani-peternak sesuai dengan kelas program yang diperuntukannya. Sementara informasi dan data yang diperoleh tim dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (BPD-SULUT) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Gorontalo, menunjukkan bahwa sebagai bank daerah, BPD Sulawesi Utara sangat mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah bagi para peternak untuk mendapatkan tambahan modal kerja. Kredit yang diberikan BPD Sulawesi Utara untuk peternak dapat berupa kredit super mikro dan kredit mikro.

Dalam hal pemberian kredit kepada peternak, pihak Bank sangat berharap bahwa Dinas Peternakan merupakan mediasi antara peternak dan Bank. Mediasi ini dalam artian

bahwa pihak Dinas bukan hanya memberikan rekomendasi kelayakan peternak namun juga diharapkan setelah dana/kredit cair, pihak Dinas tetap memonitoring peternak untuk pelunasannya. Hal ini diakui bahwa pihak bank memiliki kekurangan dalam hal pemantauan langsung kepada nasabah, akibat ketidaktahuan Bank untuk memahami kapan petani panen dan kapan pula petani membutuhkan dana.

Dengan adanya kredit program yang ditangani oleh Bank Sulawesi Utara, maka wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya dapat secara mudah mendapatkan permodalan usaha melalui skim yang ditawarkan di lokasi BPD Sulawesi Utara terdekat sehingga tidak harus ke BPD Sulawesi Utara yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian akan mempercepat proses pengajuan pembiayaan yang dibutuhkan oleh para petani-peternak di BPD terdekat.

## **SISTEMATIKA PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU KEMITRAAN**

### **Kerjasama Duta Sierra dengan PT Gorontalo Fitrah Mandiri**

Kerjasama Duta Sierra dengan PT Gorontalo Fitrah Mandiri dilakukan dalam pengembangan peternakan sapi Bali di Gorontalo dan Ekspor Sapi Bali ke Malaysia. Dalam perjanjian kerjasama ini meliputi beberapa tahapan yaitu kegiatan yaitu: (1) Pembibitan sapi bali di Gorontalo; (2) Penggemukan sapi Bali dan pengembangan teknologi pakan ternak; (3) Perdagangan (ekspor) sapi potong jenis Bali ke Malaysia; (4) Pembangunan Rumah Potong Hewan di Gorontalo.

Dalam perjanjian kerjasama ini hak dan kewajiban dari pihak pertama yaitu Duta Sierra Development, Kuala Lumpur berkewajiban menyediakan dana dan teknologi yang diperlukan untuk pengembangan usaha peternakan tersebut. Untuk ekspor perdana sejumlah 400 ekor, Duta Sierra Dev akan mentransfer dana pembelian sapi ke rekening PT GFM melalui Bank BNI Gorontalo. Pada tahap operasional pihak pertama ini akan mendirikan anak perusahaan dengan pihak kedua di Gorontalo dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pihak Pertama berhak mendapatkan keuntungan dari investasi pengembangan peternakan dan pembelian sapi Gorontalo.

Adapun hak dan kewajiban PT Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) sebagai pihak kedua yaitu PT GFM berkewajiban menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan manajemen sekaligus perijinan yang diperlukan untuk usaha kerjasama tersebut. PT GFM juga berkewajiban untuk: (1) mengurus perijinan, surat keterangan/kebenaran, karantina hewan, serta kelengkapan dokumen ekspor yang diperlukan; (2) Memelihara hubungan baik dengan semua pihak yang terkait (para *stakeholder*) sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor sapi; (3) Menjaga nama baik pihak pertama dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia

berkenaan dengan perjanjian ini; (4) Memonitor dan melaporkan kepada pihak pertama apabila terjadi kegiatan pengiriman sapi ke luar wilayah yang telah ditentukan pihak pertama yaitu pelabuhan Pasir Gudang atau Pelabuhan Muar, Johor Bahru, Malaysia. Dalam perjanjian ini pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kerjasama ini yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yang diatur tersendiri untuk setiap kegiatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama.

Pada penjualan perdana di bulan Agustus 2007 disepakati sebesar Rp.4.000.000/ekor tidak termasuk biaya angkut sampai diatas kapal, biaya pakan, biaya ekspor dan biaya operasional lainnya. Sedang untuk penjualan berikutnya disepakati harga jual sebesar Rp.21.500/kg berat hidup tidak termasuk biaya angkut sampai atas kapal, biaya pakan, biaya ekspor dan biaya operasional lainnya. Jangka waktu perjanjian ini berlaku paling lama 1 tahun terhitung sejak penandatanganan.

### **BIAYA DAN PENDAPATAN PELAKU KEMITRAAN**

Usaha ternak sebagai salah satu sumber pendapatan secara umum diusahakan belum intensif dan sebagian besar belum dikandangan. Hasil analisis usaha ternak potong secara intensif dan semi intensif menunjukkan bahwa usaha ternak masih memberikan keuntungan tunai sebesar Rp 6.3 juta dan Rp 1.7 juta per 6 bulan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak semi intensif memberikan keuntungan yang relatif kecil. Dari tabel analisis 1 diperlihatkan bahwa proporsi terbesar dari biaya produksi baik pada usaha ternak intensif atau semi intensif adalah biaya pembelian sapi bakalan dan konsentrat yang mencapai Rp 34,398,000.

Tabel 1. Analisis Usaha Ternak Sapi Potong Intensif di Gorontalo, 2007

Uraian		Volume	Satuan	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
I	Penerimaan				82,920,000
	A Penjualan Sapi	20	Ekor	4,000,000	80,000,000
	B Pupuk Kandang	14,600	Kg	200	2,920,000
II	Biaya				80,294,000
	A Pembelian Sapi Bakalan	20	Ekor	2,000,000	40,000,000
	B Hijauan Makanan Ternak <sup>2)</sup>	72,000	Kg	18	1,296,000
	C Kosentrat <sup>3)</sup>	14,040	Kg	2,450	34,398,000
	D Obat-obatan dan Vaksin	4	Kali	220,000	880,000
	E Tenaga Kerja	1,488	JOK	2,500	3,720,000
III	Biaya Tetap				
	A Kandang	20	Ekor/M <sup>3</sup>	750,000	15,000,000
	B Tempat Makanan & Minuman	20	Ekor/M <sup>3</sup>	25,000	500,000
IV	Keuntungan				
	A Keuntungan Bersih <sup>4)</sup>				2,626,000
	B Keuntungan Tunai <sup>5)</sup>				6,346,000
V	BEP		Tahun		3.1

Sumber : Data Primer, 2007 (diolah)

Tabel 2. Analisis Usaha Ternak Sapi Potong Semi Intensif di Gorontalo, 2008

Uraian	Volume	Satuan	Harga	Nilai
I Penerimaan				83,000,000
a Penjualan Sapi	20	Ekor	4,150,000	83,000,000
II Biaya				82,332,000
a Pembelian Sapi Bakalan	20	Ekor	2,200,000	44,000,000
b Hijauan Makanan Ternak <sup>2)</sup>	72,000	Kg	35	2,520,000
c Kosentrat <sup>3)</sup>	14,040	Kg	2,400	33,696,000
d Obat-obatan dan Vaksin	4	Kali	250,000	1,000,000
e Tenaga Kerja	744	JOK	1,500	1,116,000
III Biaya Tetap				
a Kandang	20	Ekor/M <sup>3</sup>	500,000	10,000,000
b Tempat Makanan & Minuman	20	Ekor/M <sup>3</sup>	25,000	500,000
IV Keuntungan				
a Keuntungan Bersih <sup>4)</sup>				668,000
b Keuntungan Tunai <sup>5)</sup>				1,784,000
V BEP		Tahun		8.4

Sumber : Data Primer, 2008 (diolah)

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMITRAAN

Program pengembangan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha peternakan sapi di Provinsi Gorontalo merupakan prioritas kedua setelah pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan utama yang mendapat perhatian dari seluruh pelaksana pemerintahan daerah, sekaligus menjadi kebijakan Gubernur Provinsi Gorontalo. Keberhasilan pola kemitraan yang diterapkan pada pengembangan komoditas jagung sebelumnya nampaknya menjadi aspirasi bagi upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai sentra produksi ternak khususnya dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional maupun ekspor melalui system usaha penggemukan sapi potong yang dilakukan dengan pola kerjasama kemitraan diantara berbagai pihak terkait, termasuk dalam upaya mendukung program pemerintah untuk pencapaian swasembada daging 2010 yang sudah dicanangkan melalui Dirjen Peternakan beberapa waktu yang lalu.

Peran pemerintah daerah melalui program PUTKATI telah memberikan dampak positif bagi usaha peternakan di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo, yang kemudian terus dikembangkan melalui program lanjutan secara bergulir. Dukungan pemerintah melalui peraturan daerah yang dikuatkan oleh Gubernur Gorontalo pada lembaga perbangkan khususnya, telah banyak membantu mendorong percepatan pengembangan usaha peternakan yang dilakukan oleh para petani-peternak yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo beberapa tahun terakhir.

Pola penyisihan keuntungan 10 persen dari BUMN dalam bentuk kredit lunak yang digulirkan oleh beberapa bank yang ada di Gorontalo, telah mendorong berkembangnya populasi ternak sapi yang dipelihara para petani-peternak, sekaligus membuka peluang usaha penggemukan sapi untuk memenuhi produksi daging yang dibutuhkan oleh masyarakat di Gorontalo, maupun beberapa provinsi serta kebutuhan daging secara nasional maupun permintaan daging dari beberapa Negara tetangga yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Salah satu kebijaksanaan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk sektor peternakan adalah menetapkan komoditas unggulan dengan kriteria: (1) Pasarnya ada dan dapat ditingkatkan; (2) Teknologinya sudah ada dan dapat diperbaiki; (3) Sudah ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan baik pengembangbiakan, budidaya, maupun pemasarannya, (4) Agroekosistemnya mendukung (Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, 2007). Sapi potong merupakan komoditas potensial ke dua yang diunggulkan setelah komoditas jagung. Potensi pengembangan usaha ternak sapi cukup prospektif dengan tersedianya lahan yang cukup luas serta adanya permintaan ternak maupun produknya. Peluang investasi juga terbuka dengan adanya BUMD yang menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemerintah negara ASEAN (Malaysia) untuk ekspor ternak sapi.

Untuk mewujudkan kerjasama kemitraan usaha sektor peternakan yang menjamin terciptanya iklim keseimbangan, keserasian dan keterpaduan, maka diperlukan iklim yang kondusif, yang menjamin kerjasama Pemerintah, pengusaha, dan petani yang saling menguntungkan dan saling percaya mempercayai. Terobosan kerjasama perdagangan ekspor produk ternak telah dilakukan Pemerintah dengan beberapa negara kawasan Asean. Untuk memenuhi kebutuhan hasil ternak tujuan ekspor, Pemerintah mencanangkan “gerakan sejuta ternak (GST)” melalui implementasi gerakan “234”, yaitu setiap petani diharapkan dapat memiliki atau mengelola lahan 2 hektar, yang dapat ditanami tanaman pangan 3 kali/tahun, dengan memiliki 4 ekor ternak sapi (Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, 2007).

Pola pengembangan komoditas unggulan daerah Gorontalo, dalam hal ini komoditas jagung maupun ternak, telah diintegrasikan dengan seluruh perangkat pendukung lainnya, melalui Keputusan Peraturan Gubernur Gorontalo atau SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah). SKPD ini berlaku secara umum, baik melalui seluruh instansi terkait, pelaku/stakeholders maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga percepatan program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan serta terkoordinasi dalam satu tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing secara berkesinambungan. Eksistensi yang menjadi dasar pembangunan daerah Gorontalo adalah sektor pertanian, sehingga penancangan dasar pembangunan tersebut merupakan acuan program-program seluruh institusi dan para pelaku

pembangunan yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gorontalo secara umum.

Program pengembangan peternakan secara luas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Peternakan telah dirintis dengan adanya program pembangunan peternakan SAPRAS (Sarana Prasarana TA 2006) serta Program Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) yang sepenuhnya diarahkan untuk mendukung Pengembangan Kawasan Integrasi Sapi dan Jagung Berbasis Pembibitan dan Penggemukan; Kegiatan melalui program-program tersebut, sepenuhnya dilakukan dengan dukungan pembiayaan dari APBD Pemda Gorontalo, khususnya untuk sarana prasarana pembuatan kandang ternak dengan sistem koloni. Dalam kaitan dengan Pengembangan Kawasan Integrasi Sapi dan Jagung Berbasis Pembibitan, pembuatan paket kandang koloni dan kandang jepit lengkap dengan fasilitas ketersediaan pertanaman pakan dan instalasi air, masing-masing mencapai 4 buah yang tersebar di 4 Kabupaten yaitu masing-masing satu unit di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango serta Kabupaten Pohuwato. Sementara yang berbasis penggemukkan dilakukan dengan pembuatan paket kandang koloni dan instalasi air, masing-masing tersebar di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

Hingga saat ini kabupaten Gorontalo merupakan daerah penyuplai ternak paling besar di Provinsi Gorontalo baik untuk konsumsi lokal, antar pulau dan bahkan ke luar negeri (Malaysia). Sektor peternakan yang memerlukan penanganan serius adalah tingginya permintaan ternak, utamanya sapi yang dikirim antar pulau bahkan luar negeri. Kondisi ini tidak berimbang dengan jumlah produksi ternak sapi di daerah yang hingga saat ini masih bersifat usaha skala rumah tangga atau sampingan dan belum mengarah ke skala usaha peternakan intensif sehingga dikhawatirkan berakibat menurunnya populasi ternak di daerah. Dari data yang ada, pada tahun 2006 (sebelum pemekaran GORUT) jumlah ternak sapi yang diantar pulaukan (export) mencapai 8.348 ekor. Sementara populasi ternak sapi mencapai 99.103 ekor. Data lain menunjukkan produksi daging (sapi, kambing, ayam, itik) mencapai 1.503.103 kg, sementara itu konsumsii daging pada komoditas yang sama sebesar 3,557 kg/kapita/tahun berdasarkan data pada tahun 2006.

Selain keputusan Gubernur tentang harga jual ternak sapi, dikantor Biro Hukum ini didapatkan juga perjanjian kerja sama antara Duta Sierra Development Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Malaysia dengan PT Gorontalo Fitrah Mandiri yang merupakan badan usaha milik daerah provinsi Gorontalo dalam pengembangan peternakan sapi Bali di Gorontalo dan ekspor sapi Bali ke Malaysia. Dalam kerjasama tersebut kedua pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan syarat/ketentuan sebagai berikut: lingkup kerjasama: perjanjian kerjasama meliputi pengembangan usaha peternakan sapi Bali yang berlokasi di Gorontalo yang terdiri dari beberapa tahap kegiatan yaitu pembibitan sapi Bali, penggemukan sapi Bali dan pengembangan teknologi pakan ternak, perdagangan (eksport) sapi potong jenis Bali ke Malaysia dan pembangunan rumah

potong hewan di Gorontalo. Pemasaran sapi Bali di Gorontalo ke Malaysia dimulai pada bulan Agustus 2007 dengan ketentuan sbb: jumlah 400 ekor, jenis sapi Bali asli atau Bali campuran, usia diatas 2 tahun, kondisi sehat, tidak berpenyakit dan telah melalui pemeriksaan karantina hewan. Hak dan kewajiban dari Malaysia diantaranya adalah menyediakan dana dan teknologi yang diperlukan untuk pengembangan usaha peternakan, mendirikan anak perusahaan yang berdomisili di Gorontalo, berhak mendapatkan keuntungan dari investasi pengembangan peternakan dan pembelian sapi di Gorontalo.

Dengan mempelajari syarat-syarat yang ditentukan tersebut, maka pemerintah daerah Gorontalo, melalui BUMD tetap dapat memanfaatkan peluang ekspor ternak sapi potong hidup dengan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, atau sekaligus mengeksport daging segar yang dilakukan dari hasil pemotongan hewan (ternak sapi) yang dilakukan di wilayah Gorontalo, dengan memanfaatkan Rumah-rumah Potong Hewan (RPH) yang ada. Dengan demikian mempunyai dampak pada pengembangan nilai tambah maupun lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan fihak yang berkepentingan lainnya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekspor maupun dalam hal investasi.

## **PENUTUP**

Upaya pemberdayaan usaha disektor pertanian yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo secara simultan terus digalakkan. Sukses komoditas jagung yang telah menjadi “icon” sektor pertanian diantara komoditas potensial lainnya yang diusahakan masyarakat telah menjadi modal dasar bagi pola-pola pengembangan komoditas pertanian dalam kaitan pembangunan ekonomi masyarakat. Perhatian semua fihak terkait saat ini tertuju pada bagaimana upaya pengembangan usaha ternak sapi potong yang berbasis usaha peternakan rakyat yang dipadukan dengan berbagai pelaku usaha ternak secara lebih luas, baik di tingkat lokal, regional bahkan dalam skala nasional diantaranya dalam kaitan dengan Program Peningkatan Swasembada Daging Sapi yang dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.

Bentuk dan upaya menjadikan usaha ternak sapi potong tersebut, diantaranya dilakukan dengan pola *partnership/kemitraan* yang kemudian berkembang pada pola kerjasama pemasaran ternak sapi potong dimana para petani-peternak sebagai pelaku utama dalam pengusahaan ternak sapi potong. Dasar pengalaman beternak diperoleh para petani-peternak dari program PUTKATI yang secara berkesinambungan dijalankan oleh para petani-peternak di wilayah Provinsi Gorontalo sejak masih menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Program tersebut telah memberikan dampak positif bagi pola pengusahaan ternak sapi yang dilakukan oleh para peternak sekaligus

memberikan insentif pendapatan yang cukup signifikan bagi rumahtangga peternak tersebut.

Manajemen yang diterapkan oleh masing-masing pelaku kerjasama dan besarnya perhatian dari Pemerintah Daerah dengan “komando” di Tingkat Provinsi hingga pemerintahan desa yang dijadikan komitmen dasar pengaturan dalam pengembangan usaha ternak sapi potong telah mendorong tumbuhnya kepercayaan dari semua pihak terkait, sekaligus telah memberikan dampak bagi berbagai *stakeholders* ikut serta secara bersama-sama memberikan peran masing-masing untuk mendukung tercapainya upaya yang sedang digalakkan, termasuk lembaga-lembaga pembiayaan melalui perbankan, industri pakan, sumber-sumber teknologi maupun berbagai unsur terkait dalam pemasaran yang merupakan kunci pelaksanaan kemitraan yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi Gorontalo. 2008. Gorontalo Dalam Angka 2007.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008. Tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong. Jakarta.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo. 2007. Laporan Akhir Road Map Pengembangan Komoditas Peternakan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
- Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo. 2007. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. 2006. Kumpulan Undang-undang Bidang Kesmavet. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.
- Global Humanitarian Platform, 12 July 2007. Principles of Partnership A Statement of Commitment. [www.globalhumanitarianplatform.org](http://www.globalhumanitarianplatform.org)
- Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2008. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 29/17/I/2008 Tentang Harga Jual Ternak Sapi dalam Wilayah Provinsi Gorontalo. Gorontalo.
- Pemerintah Kabupaten Boalemo. 2008. Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pedoman Penggemukan Ternak Sapi Potong Sistem Kereman Pola Bagi Hasil. Boalemo.
- PT GFM. 2006. BUMD Prov Gorontalo: Company Profile. 8 halaman.
- Rivani, A. dan D. Hidayat 2007. Keterkaitan Petani dengan Pemasaran: Kesejahteraan Petani dan Pengentasan Kemiskinan. CAPSA Monograph No.49, UNCAPSA-CAPSA, Bogor.
- Saptana, A. Agustian, H. Mayrowani, dan Sunarsih. 2006. Analisis Kelembagaan Partnership Rantai Pasok Komoditas Hortikultura. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Laporan Teknis.

- Saptana, E.L. Hastuti, Ashari, K.S. Indraningsih, S. Friyatno, Sunarsih, dan V. Darwis. 2005. Analisis Kelembagaan Partnership pada Komoditas Hortikultura. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.. Bogor.
- Sayaka, B., IW Rusastra, Rosmijati S, Supriyati, A Agustian, Iwan SA, Wahyuning KS, Ashari, Jefferson S, Roosgandha E dan Y Supriyatna. 2008. Pengembangan Kelembagaan Partnership dalam Pemasaran Komoditas Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Laporan Teknis.
- Suparta, N. 2005. Pendekatan Holistik Membangun Agribisnis. CV Bali Media Adhikarsa. Denpasar.
- Syahyuti. 2006. 30 konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta.